

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Keadaan Geografis Objek Penelitian

Kelurahan Mergosono termasuk dalam wilayah kecamatan kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, yang terbagi menjadi 6 RW dan 77 RT dengan luas wilayah 103,25 H. Berdasarkan penggunaannya terdiri atas :

- Luas daerah/wilayah : 103,25 Ha
- Tanah sawah : 1 Ha
- Tanah keperluan fasilitas umum : 0,5 Ha
- Tanah keperluan fasilitas sosial : 0,14 Ha

Adapun batas-batas wilayah kelurahan Mergosono sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Kotalama
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bumiayu
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gadang
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ciptomulyo

Wilayah kelurahan Mergosono terletak pada ketinggian 475 m di atas permukaan laut. Dengan topografi bentuk wilayah 100 % datar samapi berombak, berombak sampai berbukit 0% dan berbukit sampai bergunung 0 %. Suhu udara maksimum 29°C dan minimum 28°C yang terletak di sebelah selatan pusat kota Malang, dengan kantor kelurahan di JL Kol. Sugiono 5 No. , kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Adapun peta keseluruhan wilayah kelurahan Mergosono yang dikelompokkan berdasarkan letak per RW dapat dilihat di lampiran.

b. Keadaan Demografi

Tabel 1

Jumlah Penduduk Kelurahan Mergosono Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
Laki-laki	8.930
Perempuan	8.931

Sumber : Monografi Kelurahan 2011

Berdasarkan data kependudukan kelurahan Mergosono menurut jenis kelamin jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 8.930 jiwa sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan 8.931 jiwa. Yang terbagi ke dalam 4541 KK dan terbagi dalam 6 RW dan 77 RT.

Berdasarkan data kependudukan kelurahan Mergosono menurut golongan usia dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.
Penduduk Kelurahan Mergosono Menurut Usia

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0-5	1.253
2.	6-15	4.487
3.	16-60	11.264
4.	60 <	847

Sumber : Monografi Kelurahan Mergosono 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk kelurahan mergosono didomisilikan oleh penduduk yang berusia antara 16 sampai dengan 60 tahun sebanyak 11.264 jiwa. Sedangkan penduduk yang berusia 60 tahun keatas merupakan jumlah yang paling sedikit yaitu 847 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa di kelurahan Mergosono memiliki banyak penduduk yang berusia produktif. Kemudian berdasarkan data penduduk Mergosono menurut agama, dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kelurahan Mergosono Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	16.600
2.	Katolik	1.132
3.	Protestan	85
4.	Hindu	19
5.	Budha	25

Sumber : Monografi Kelurahan Mergosono 2011

Berdasarkan data yang diperoleh dari monografi kelurahan Mergosono dapat diketahui penduduk kelurahan Mergosono mayoritas beragama Islam dengan jumlah 16.600 jiwa, lalu beragama katolik dengan jumlah 1.132 jiwa, protestan 85 jiwa, budha 25 jiwa dan agama Hindu merupakan terkecil di kelurahan Mergosono dengan 19 jiwa.

c. Keadaan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa karena dengan pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bekal mencari kehidupan yang layak dan makmur. Tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Mergosono beragam, yakni :

Tabel 4

Jumlah Penduduk Kelurahan Mergosono Menurut Pendidikan

No.	Tingkatan	Jumlah (jiwa)
1.	Tidak sekolah	905
2.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	290
3.	Tamat SD	4.365
4.	Tamat SLTP	5.200
5.	Tamat SLTA	6.295
6.	Perguruan Tinggi	231
7.	Tamat Akademi	182
8.	Buta Huruf	107

Sumber : Monografi Kelurahan Mergosono 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk di kelurahan Mergosono jumlah paling besar adalah lulusan SLTA sebanyak 6.295 jiwa dan lulusan SLTP sebanyak 5.200 jiwa. Untuk jumlah penduduk yang tamat SD sebanyak 4.365 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang perguruan tinggi sebanyak 231 jiwa. Di kelurahan Mergosono masih banyak yang tidak sekolah sebanyak 905 jiwa, sedangkan yang buta huruf sebanyak 107. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kelurahan Mergosono tingkat pendidikan penduduk masih tergolong cukup rendah dikarenakan banyak yang tidak sekolah.

Tabel 5

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kelurahan Mergosono

No	Pendidikan	Jumlah Sekolah (buah)	Jumlah Murid (orang)	Jumlah Pengajar (Orang)
1.	Taman Kanak-kanak (TK)			
	a. TK swasta umum	2	97	6
	b. TK swasta islam	2	104	8
2.	Sekolah Dasar (SD)			
	a. SD Negeri	6	1.232	80
	b. SD swasta Umum	1	125	11
	c. SD Islam	2	164	11
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)			
	a. SLTP swasta islam	1	104	13

Sumber : Monografi Kelurahan Mergosono 2011

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di kelurahan Mergosono terdapat 4 buah Taman Kanak-Kanak dengan jumlah murid 203 orang dan jumlah tenaga pengajar 14 orang. Adapun terdapat 9 buah Sekolah Dasar dengan jumlah murid 1521 orang dan jumlah tenaga pengajar 102 orang. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama terdapat 1 buah dengan jumlah murid 104 orang dan tenaga pengajar sebanyak 13 orang.

d. Kondisi Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan data kependudukan kelurahan Mergosono kondisi mata pencaharian penduduk tahun 2011, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6

Penduduk Kelurahan Mergosono Menurut Mata Pencaharian tahun 2011

No.	Uraian	Orang
1.	Pengusaha sedang/besar	25
2.	Pengrajin/industri kecil	90
3.	Buruh Industri	832
4.	Buruh Bangunan	713
5.	Pedagang	987
6.	Pengangkutan	612
7.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	190
8.	Peternak	25
9.	Anggota TNI	19
10.	Pensiunan PNS/TNI	301
	Jumlah	3.794

Sumber : Monografi Kelurahan Mergosono tahun 2011

Sebagian besar mata pencaharian penduduk kelurahan Mergosono bergerak dalam sektor swasta, yaitu pedagang dengan jumlah 987 orang. Mata pencaharian ini menjadi paling besar karena di kelurahan Mergosono mempunyai pasar Tradisional yakni “Pasar Kotalama” yang bertepatan di RW IV. Penduduk kelurahan Mergosono mempunyai inisiatif berdagang dikarenakan padat penduduk. Walaupun demikian, di sisi lain banyak yang masih berstatus sebagai buruh industri. Biasanya yang berstatus sebagai buruh industri adalah warga yang tingkat pendidikannya relatif rendah, yaitu SLTP ke bawah. Selain itu sebagian warga yang bekerja sebagai pengangkutan atau sopir angkutan namun dengan semakin ketatnya persaingan dalam hal pengangkutan maka sebagian berhenti dikarenakan pendapatan mereka semakin rendah, sedang biaya kehidupan semakin tinggi. Apalagi harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak membuat kehidupan sopir angkutan semakin terhimpit. Kemudian terbanyak ketiga penduduk kelurahan Mergosono bekerja sebagai buruh bangunan, yang penghasilannya tidak menentu.

Kondisi terakhir menunjukkan bahwa sektor ekonomi bagi keluarga miskin semakin memprihatinkan karena ketatnya persaingan dan semakin mahalnya harga kebutuhan pokok kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan :

- a) Kurang/tidak mempunyai modal usaha.
- b) Kurangnya keahlian dalam bidang yang ditekuni.

- c) Tidak adanya keterampilan ibu rumah tangga miskin yang dapat dipergunakan untuk menambah penghasilan keluarga.

Tabel 7

Jumlah Pencari Kerja

Pencari Kerja	Jumlah Jiwa
Laki-laki	50
Perempuan	213
Total Penduduk	263

Sumber : Data Monografi Kelurahan Mergosono 2011

Jumlah pengangguran di kelurahan Mergosono masih terbilang cukup banyak, para pencari kerja berjenis kelamin laki-laki sebanyak 50 jiwa, sedangkan para pencari kerja berjenis kelamin perempuan sebanyak 213 jiwa.

e. Keadaan Mobilitas Penduduk

Keadaan mobilitas kelurahan Mergosono dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 8

Mobilitas Penduduk

No.	Jenis Mutasi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pindah Datang	79	90	169
2.	Pindah Keluar	122	130	252
3.	Lahir	123	99	222
4.	Mati	39	26	65

Sumber : Data Monografi Kelurahan Mergosono 2011

f. Kelembagaan di Kelurahan Mergosono

Tabel 9

Kelembagaan Kemasyarakatan

No.	Uraian
1.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
2.	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
3.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4.	Karang Wredha
5.	Karang Taruna
6.	Perkumpulan Lansia
7.	Senam Tera Indonesia
8.	Majelis Ta'lim
9.	Majelis Gereja
10.	Remaja Masjid

Sumber : Monografi Kelurahan Mergosono 2011

Tabel 10

Kelembagaan Politik

No.	Nama Partai
1.	PDIP
2.	PKB
3.	PPP
4.	PAN
5.	GOLKAR
6.	Partai Demokrat
7.	PNI Marhaen
8.	PKS

Sumber : Monografi Kelurahan Mergosono 2011

Tabel 11
Kelembagaan Ekonomi

No.	Uraian	Jumlah (buah)
1.	Koperasi	10
2.	Pasar umum	1
3.	Pasar bangunan permanen	1
4.	Toko/kios/warung	295
5.	Telepon Umum	8

Sumber : Monografi Kelurahan Mergosono 2011

Tabel 12
Lembaga Usaha

No.	Uraian	Jumlah (buah)	Tenaga Kerja (orang)
1.	Industri		
	a. Besar dan sedang	13	150
	b. Kecil	10	45
	c. Rumah tangga	9	25
2.	Perhotelan/losmen/penginapan	1	6
3.	Rumah makan/warung makan	95	120
	Angkutan	240	240

Sumber : Monografi Kelurahan Mergosono 2011

2. Gambaran Umum Permasalahan Kemiskinan Di Kelurahan Mergosono

Secara umum permasalahan kemiskinan yang ada di kelurahan Mergosono, antara lain :

1. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan di kelurahan Mergosono secara umum dapat digambar sebagai berikut :

- Banyak ibu hamil yang tidak di imunisasi TT, tidak memeriksakan kehamilannya dan mengalami anemia serta masih ada keluarga miskin yang tidak mau ke posyandu.
- Banyak balita yang berada di garis kuning dan merah dalam hal ini kurang gizi.
- Kurang adanya perhatian yang serius terhadap lansia
- Masih adanya penyakit menular yang ada di warga.
- Kurangnya sarana dan prasarana posyandu untuk menunjang kegiatan dalam menangani permasalahan kesehatan.

2. Pendidikan

Masalah pendidikan di kelurahan Mergosono masih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Karena dari data yang ada ternyata di kelurahan Mergosono banyak yang tidak tamat SD, anak putus sekolah atau bahkan buta huruf. Rata-rata kondisi perekonomian orang tua yang menyebabkan anak

menjadi putus sekolah. Hal ini perlu penanganan agar anak yang putus sekolah dapat mendapatkan pendidikan minimal untuk menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun. Sedangkan untuk yang buta huruf diikutkan program paket A. Minimnya pendidikan yang ditempuh warga di kelurahan Mergosono dikarenakan mahalnya biaya pendidikan ditambah dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu untuk membiayai biaya sekolah.

3. Ekonomi

Dalam bidang ekonomi di kelurahan Mergosono masih terdapat permasalahan yang menjadi masalah kemiskinan, yakni :

- Banyak warga yang berpenghasilan rendah sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal tersebut mungkin disebabkan karena kurangnya keahlian warga dalam bidang yang ditekuni, modal dan tidak adanya keterampilan ibu rumah tangga yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan.
- Kendala usaha kecil menengah (UKM) untuk mengembangkan usahanya antara lain kekurangan modal untuk pengadaan bahan dan alat. Kurang/tidak mempunyai modal untuk usaha baik beli bahan maupun peralatan.

4. Lingkungan

Dalam bidang lingkungan di dalam kelurahan Mergosono masih terdapat permasalahan yang menjadi masalah kemiskinan, yakni :

- Masih ada rumah warga yang tidak layak huni dan tidak punya jamban untuk buang air besar bahkan sulit untuk mendapatkan air bersih dikarenakan tidak mempunyai sarana air bersih dan MCK . Kemudian masih ada warga yang membuang sampah sembarangan bahkan di sungai maupun di bakar. Hal ini merupakan kurangnya kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Kebutuhan akan air bersih kurang, sehingga masih banyak warga yang memasak memakai air sungai dan banyak warga yang masih mandi dan cuci-cuci di sungai brantas yang melintas di kelurahan Mergosono.
- Saluran air (drainase) tidak dapat mengalir dengan lancar sehingga air menggenang yang mengakibatkan bau tidak sedap dan banyak nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Kemudian ada beberapa lokasi yang masih terjadi banjir jika musim hujan karena tidak adanya resapan dan saluran pembuangan
- Tidak mampu untuk memperbaiki rumah yang mungkin dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang rumah sehat atau tidak mempunyai modal untuk memperbaiki rumah.

3. Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Mergosono.

a. Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kelurahan Mergosono

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut :

a. Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensial, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang ingin dicapai.

Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendamping masyarakat dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat diwilayahnya.

b. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah dana stimulant keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

c. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat termasuk kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif.

d. Bantuan pengelolaan dan pengembangan program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

Konsep pemberdayaan yang diterapkan dalam PNPM Mandiri Perkotaan bukanlah sekedar teori saja. Hal ini diwujudkan dalam penguatan kelembagaan dan pengentasan kemiskinan. Di setiap kelurahan dibentuk PNPM Mandiri

Perkotaan yang sifatnya menangani kemiskinan perkotaan. Yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang terdiri dari masyarakat sendiri secara demokratis. Kemudian Pemerintah memfasilitasi TKPP (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) yang bermitra dengan perusahaan penyedia konsultan dan beberapa faskel yang melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat dalam penanganan kemiskinan.

Lembaga yang pertama kali dibentuk adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), dimana KSM tersebut merupakan warga wakil dari kelompok wilayah RT. Kemudian KSM tersebut juga membentuk BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), Lembaga yang menangani langsung Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan) di kelurahan. PNPM di kelurahan Mergosono telah dilaksanakan sejak 2007. Dengan adanya PNPM ini kelurahan Mergosono telah banyak membantu mengatasi masalah lingkungan dan kemiskinan. Namun, PNPM mandiri perkotaan yang dilaksanakan di Kelurahan Mergosono paling banyak bergerak dalam masalah lingkungan sesuai hasil pemetaan dari faskel dan kader masyarakat Mergosono, hal tersebut dilakukan secara swadaya dari masyarakat. Adanya program PNPM Mandiri Perkotaan tidak hanya untuk mengatasi lingkungan melainkan dapat menguatkan lembaga dan perekonomian masyarakat. Kemudian warga yang menginginkan dana PNPM Mandiri Perkotaan harus mengisi formulir dan membuat proposal per satu kelompok KSM yang terdiri dari tiga orang.

b. Gambaran Umum Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Mergosono.

BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono kecamatan Kedungkandang didirikan pada tahun 1999. Adapun azas, visi, misi, prinsip, tujuan, dan tugas BKM “Margo Rukun Sejahtera” adalah

1. Azas BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berasaskan pancasila dan berdasarkan undang-undang dasar 1945 dan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti dapat dipercaya, kerelawanan, kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam keragaman.

2. Visi BKM

Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan, kesehatan, pendidikan dan pembangunan sarana dan prasarana umum.

3. Misi BKM

- a. Menciptakan lapangan kerja baru bagi Kepala Keluarga miskin melalui pelatihan dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan.
- b. Meningkatkan partisipasi perempuan melalui kesehatan dan pendidikan, dan kewirausahaan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Keluarga miskin

- d. Meningkatkan peran kelembagaan BKM melalui kerjasama kelembagaan.

4. Prinsip BKM

BKM “Margo Rukun Sejahtera” bekerja berdasarkan prinsip :

- a. Demokrasi : segala pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kepentingan orang lain harus dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak menemukan jalan terang, maka pengambilan keputusan dilaksanakan secara voting.
- b. Transparan : pengelolaan keuangannya harus terbuka terhadap seluruh masyarakat.
- c. Akuntabilitas : pengelolaan keuangan termasuk reputasi BKM dalam hal pengelolaan, evaluasi, harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun kemanfaatannya.
- d. Partisipasi : program harus dilaksanakan secara partisipatif dan mengacu pada inisiatif dari bawah serta mampu membangkitkan peran aktif seluruh warga, baik yang kaya maupun yang miskin dengan cara membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- e. Desentralisasi : segala bentuk keputusan harus diambil oleh lembaga yang dekat dengan KSM.

5. Tujuan BKM

Maksud dari BKM “Margo Rukun Sejahtera” adalah

- a. Sebagai lembaga yang dipimpin secara kolektif-kolegial dari suatu organisasi masyarakat warga yang berbentuk paguyuban. Yang fungsi utama sebagai dewan pengambilan keputusan dan dilakukan melalui proses pengambilan keputusan secara partisipatif.
 - b. Sebagai sumber energi dan inspirasi untuk membangun prakarsa dan kemandirian warga yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan warga bersama, memecahkan persoalan bersama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap pengaruh dari siapapun.
 - c. Sebagai organisasi masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kelurahan Mergosono diharapkan benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin.
 - d. Sebagai organisasi kemasyarakatan, Badan Keswadayaan Masyarakat merupakan wadah perjuangan dan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6. Tujuan BKM

Tujuan BKM adalah untuk menumbuhkan kembali solidaritas sosial sesama warga agar dapat bekerjasama secara demokratis, sehingga mampu membangun kembali kehidupan masyarakat yang mandiri.

- a. Dalam jangka panjang, terpenuhinya pelayanan dasar untuk indeks pembangunan manusia di Kelurahan Mergosono dapat meningkat.
- b. Dalam jangka menengah, BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono merumuskan, menetapkan dan melaksanakan perencanaan

jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis), yang berlaku selama 3 tahun sejak tanggal yang ditetapkan.

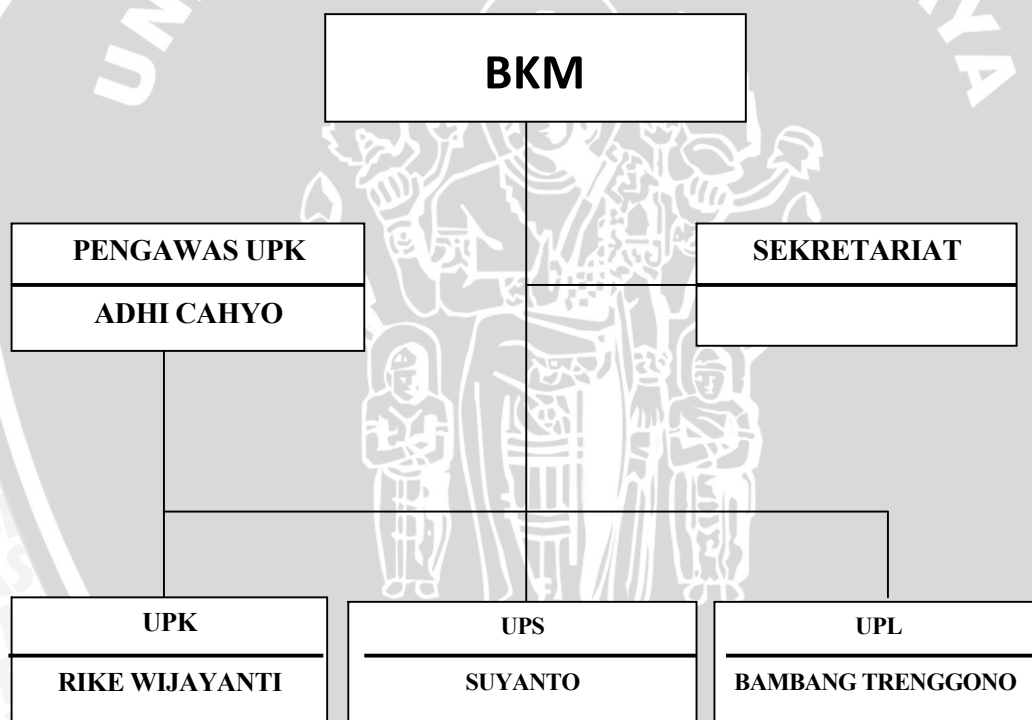
- c. Dalam jangka pendek, BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono berhak membahas, menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM berikut penggulir kegiatannya.

7. Tugas BKM

Tugas BKM “Margo Rukun Sejahtera” adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang meliputi :

1. Merumuskan secara partisipatif Perencanaan Jangka Menengah (3 tahun) Program Penanggulangan Kemiskinan di kelurahan Mergosono.
2. Mampu bertindak sebagai forum pengambil keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
3. Menumbuh kembangkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraannya.
4. Mengawasi Proses pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang sehari-harinya dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK).

5. Menetapkan keputusan seleksi dari berbagai usulan, melaksanakan rapat secara terbuka dan melakukan audit keuangan BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono.
6. Merumuskan, menyusun, dan menetapkan aturan main (termasuk sanksi) dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya masyarakat yang dimulai dari PNPM Mandiri Perkotaan.
8. Struktur Organisasi BKM ”Margo Rukun Sejahtera”



Sumber : Profil data BKM tahun 2011

Gambar 2. Struktur Organisasi BKM ”Margo Rukun Sejahtera”

Nama-nama anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (Pimpinan Kolektif) :

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. KADIONO | RW 01 |
| 2. RIZAL MA'ARIF | RW 01 |
| 3. AYUS KESTIANTO | RW 02 |
| 4. M. ARIEF | RW 02 |
| 5. R HARRY MURDIYANTO | RW 03 |
| 6. WAWAN YUSBIANTONO | RW 03 |
| 7. ACHMAD HADI | RW 04 |
| 8. HARIYADI | RW 04 |
| 9. HERRY SANTOSO | RW 05 |
| 10. DEWI YULI PANCAWATI | RW 05 |
| 11. MASIKIN | RW 06 |

Susunan Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat lengkap disahkan oleh pimpinan sidang. Sebagian peran dan wewenang pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat :

1. Badan Keswadayaan Masyarakat : terdiri dari 11 orang sebagai pembuat dan penentu seluruh kebijakan BKM
2. Tugas Sekretariat
 - a. Menyusun agenda rapat/pertemuan rapat
 - b. Membuat dan menyebarkan surat undangan
 - c. Bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat/pertemuan BKM
 - d. Memberikan hasil notulensi kepada seluruh anggota BKM
 - e. Mencatat administrasi keuangan operasional BKM dan mencatat pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat

- f. Melaporkan administrasi keuangan kepada BKM secara berkala
- g. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
3. Pengawas UPK bertugas mengawasi kinerja UPK
4. Tugas Unit Pengelolaan Keuangan (UPK)
 - a. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM ekonomi
 - b. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM ekonomi
 - c. Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM mengadministrasi keuangan
 - d. Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang mendukung ekonomi UPK
5. Tugas Unit Pengelolaan Sosial (UPS)
 - a. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM
 - b. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM (panitia) bidang sosial
 - c. Membangun/mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga
 - d. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/relawan dalam komunitas belajar kelurahan
 - e. Mendorong kepedulian warga dalam kegiatan sosial seperti santunan, beasiswa, dan lain-lain
 - f. Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain yang mendukung program sosial UPS
6. Tugas Unit Pengelolaan Lingkungan (UPL)

- a. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM ekonomi
 - b. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM ekonomi
 - c. Melakukan pengelolaan Keuangan pinjaman bergulir untuk KSM mengadministrasi keuangan
 - d. Menjalini kemitraan dengan pihak-pihak yang mendukung program ekonomi UPK
9. Lambang BKM “Margo Rukun Sejahtera” Kelurahan Mergosono



Sumber : data BKM “Margo Rukun Sejahtera”

Gambar 3 : Lambang BKM “Margo Rukun Sejahtera” Kelurahan Mergosono

Lambang Badan Keswadayaan Masyarakat ‘MARGO RUKUN SEJAHTERA’ adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Lambang BKM adalah segi empat sama sisi dengan latar belakang warna putih.
2. Didalam segi empat tersebut ada gambar padi dan kapas sebagai lambang kemakmuran.
3. Ditengah – tengah gambar padi kapas ada segi lima sama sisi sebagai lambang PANCASILA serta berlatar belakang warna biru sebagai lambang kedamaian, dan didalamnya ada tulisan BKM “MARGO RUKUN SEJAHTERA” Kel.Mergosono.

Badan Keswadayaan Masyarakat “MARGO RUKUN SEJAHTERA” mempunyai alat kelembagaan sebagai berikut :

- Rembug Warga
- Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat
- Unit Pengelola Keuangan (UPK)
- Unit Pengelola Sosial (UPS)
- Unit Pengelola Lingkungan (UPL)
- Unit Pengelola Ekonomi Produktif (UPE)
- Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)
- Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Untuk seterusnya, anggota Badan Keswadayaan Masyarakat “MARGO RUKUN SEJAHTERA” dapat diangkat untuk dua kali periode berturut - turut dan setelah itu harus diganti dengan mempertimbangkan regenerasi Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat “MARGO RUKUN SEJAHTERA” secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu setiap periode kepengurusan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat “MARGO RUKUN SEJAHTERA” selalu terdiri dari :

- Satu pertiga dari jumlah seluruh anggota Badan Keswadayaan Masyarakat “MARGO RUKUN SEJAHTERA” berasal dari anggota Badan Keswadayaan Masyarakat “MARGO RUKUN SEJAHTERA” periode sebelumnya.
- Dua pertiga dari jumlah seluruh anggota Badan Keswadayaan Masyarakat “MARGO RUKUN SEJAHTERA” anggota yang dipilih dari utusan masyarakat melalui Rembug Warga.

Kelompok Swadaya Masyarakat [KSM], adalah suatu kelompok masyarakat yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang dan paling banyak lima belas orang yang dibentuk berdasarkan kesukarelaan dan memiliki ikatan sosial, memiliki tujuan ekonomi yang sama, tujuan sosial yang sama, tujuan pembelajaran yang sama dan berdomisili yang sama (dalam satu RW yang sama).

- Syarat Pembentukan KSM
 1. KSM beranggotakan sekurang – kurangnya tiga orang dan sebanyak – banyaknya lima belas orang serta berdomisili di wilayah satu RW yang sama.
 2. Sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota berasal dari pengusaha ekonomi lemah

3. Mempunyai kesamaan usaha atau usaha yang berbeda tapi masih berhubungan satu dengan yang lain.

- Syarat Pengajuan Pinjaman oleh KSM

1. Mengisi proposal pengajuan pinjaman.

2. Diketahui oleh Ketua RT dan RW setempat.

3. Bersedia di survei secara langsung usahanya oleh BKM maupun Unit Pengelola yang lain.

4. Bersedia menanda tangani akad kredit dengan menyediakan materai senilai Rp.6000,- sebanyak dua lembar.

5. Bersedia menerima segala bentuk sanksi yang telah ditetapkan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat “Margo Rukun Sejahtera”, diantaranya :

- Denda akibat keterlambatan membayar angsuran setiap bulannya.

- Menerima surat teguran / peringatan dari Unit Pengelola Keuangan (UPK).

- Bersedia namanya diumumkan di masyarakat luas akibat menunggak angsuran.

- Bersedia tunggakan angsurannya dibawa kepihak Kepolisian kalau segala bentuk Sanksi diatas tidak diindahkan sama sekali.

6. Membayar asuransi kematian sebesar satu persen dari total pinjaman. Yang akan penggunaan dananya diperuntukkan .

- a. Melunasi pinjaman jika terdapat anggota KSM yang meninggal dunia .

B. Penyajian Data Fokus

1. Upaya Pemberdayaan Badan Keswadayaan Masyarakat

a. Upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga BKM

a.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (Level individu)

Pengembangan sumber daya manusia sebagai motor penggerak berjalannya suatu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan sebagai lembaga pelaku sosial bersifat lokal dari rakyat untuk rakyat. Pengembangan Sumber Daya Manusia dimaksudkan menjadi dasar untuk menggali potensi setiap anggota dalam bentuk pelatihan-pelatihan untuk menjalankan tugas yang ada pada Badan Keswadayaan Masyarakat kelurahan Mergosono. Dari hasil wawancara kepada salah seorang anggota PK BKM menyatakan bahwa :

Pelatihan yang diberikan dapat dikelompokkan menurut jenis pekerjaan masing-masing, yakni :

1. Pelatihan dasar BKM
2. Pelatihan Pembukuan
3. Pelatihan khusus KSM
4. Pelatihan khusus relawan

Sumber : Wawancara, Kamis 9 Februari 2012, pukul 10.30 WIB

Berdasarkan hal yang telah disampaikan oleh anggota PK BKM “Margo Rukun Sejahtera” bahwa Pelatihan-pelatihan yang diberikan sudah menjangkau untuk memberikan keterampilan kepada para anggota BKM demi menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Kemudian mengenai manfaat yang muncul

mengenai pelatihan yang sudah diberikan dan dana untuk pelatihan. Dari hasil wawancara kepada salah seorang anggota UPK mengutarakan bahwa :

“Sebenarnya pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk BKM ini sangatlah bermanfaat, agar bisa meningkatkan kualitas dalam bekerja dan mengabdikan masyarakat, dan pembayaran pelatihan mengambil dari uang kas BKM kemudian pelatihan yang diberikan biasanya dilaksanakan di kantor Kecamatan bersama dengan BKM sekecamatan”

Sumber : Wawancara, Kamis 9 Februari 2012, pukul 10.45 WIB.

Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh Unit Pengelola Keuangan menunjukkan bahwa pelatihan yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk bekal dalam menjalankan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab masing-masing anggota. Pelatihan yang diberikan biasanya dilaksanakan secara gratis agar tidak membebani kinerja masing-masing anggota.

a.2 Pengembangan Kelembagaan (Level Organisasi)

Pengembangan kelembagaan dapat dilihat dari adanya misi, visi, dan tujuan yang jelas dari lembaga BKM itu sendiri, dan bagaimana BKM menentukan kebijakan sendiri dalam mengatasi persoalan yang ada dalam penanganan kemiskinan. Kemudian mengenai langkah-langkah yang ditempuh oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam menghadapi persoalan ataupun masalah yang ada dalam BKM. Dari hasil wawancara kepada salah seorang yang menjabat di BKM “Margo Rukun Sejahtera menyatakan bahwa :

Pada dasarnya setiap permasalahan yang ada di BKM “Margo Rukun Sejahtera” diselesaikan dengan melakukan musyawarah/rapat internal PK BKM, yakni 13 Anggota PK BKM dikumpulkan untuk musyawarahkan dan menghasilkan keputusan sesuai kesepakatan bersama. (sumber : wawancara Senin 4 Juni 2012, pukul 11.00)

Kemudian pengembangan kelembagaan dapat dilihat dari adanya pengakuan dan dukungan dari masyarakat kepada lembaga BKM kelurahan Mergosono sebagai *agent of change* (agen perubahan) dapat dilihat dari penilaian, pengakuan, keikutsertaan masyarakat Kelurahan kepada lembaga BKM tersebut, dimana masyarakat sebagai obyek demi terberantasnya kemiskinan dan BKM sebagai subyek. Dari hasil wawancara kepada Koordinator BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono menjelaskan bahwa :

“Partisipasi masyarakat Kelurahan Mergosono selama ini dapat dilihat dengan banyaknya warga yang ikut menghadiri rapat BKM dan turut serta berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana maupun ikut aktif dalam BKM seperti relawan ataupun KSM. Pembentukan KSM ini ada 3 program yang mana ada KSM ekonomi, sosial dan lingkungan yang mana KSM ini bertanggungjawab atas pekerjaannya. Tak lupa banyak warga yang turut serta menjadi KSM untuk melaksanakan kegiatan BKM, namun proses pembentukan KSM tidak selamanya berjalan lancar akan tetapi mempunyai kendala dimana sulit untuk menemukan relawan”
Sumber : Wawancara, Jumat, 10 februari pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap Koordinator BKM bahwa keikutsertaan masyarakat dalam rapat maupun kegiatan dalam rangka menuju perubahan merupakan bentuk kepedulian dan dukungan masyarakat kepada Badan Keswadayaan Masyarakat di lingkungan kelurahan Mergosono dapat dilihat dari rapat yang sudah diadakan, dapat dilihat bahwa warga sudah peduli dengan adanya lembaga tersebut. Foto dibawah ini yang menandakan kepedulian dan keaktifan masyarakat yang diadakan oleh BKM dengan

bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain di lingkungan Mergosono seperti LPMK, PKK, RW, RT dan sebagainya.



Sumber : Data BKM “Margo Rukun Sejahtera”

Gambar 4 : Dokumentasi Hasil Rapat

a.3 Level system (Kemampuan)

Pada level system/kemampuan pada dasarnya BKM “Margo Rukun Sejahtera” yang terpapar pada teori mengenai peningkatan kapasitas suatu lembaga dimulai dari individu, organisasi dan yang terakhir adalah system atau kemampuan, dalam hal ini BKM “Margo Rukun Sejahtera” belum sampai pada level ini dikarenakan belum mampu secara mandiri mempunyai modal sendiri dan masih mendapatkan bantuan dari pihak eksternal dalam kinerjanya untuk penanganan kemiskinan di Perkotaan khususnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah seorang anggota PK BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono menyatakan bahwa :

Sumber keuangan BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono selama ini berasal dari :

“Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diperoleh dari Pemerintah untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan digunakan untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam usaha ekonomi produktif (modal bergulir), dan pembangunan sarana prasarana dasar dan pengembangan sosial. Selanjutnya dana yang diperoleh dari keuntungan dana bergulir yang dikelola untuk penambahan modal Badan Keswadayaan Masyarakat.”

Sumber : Wawancara, Selasa, 28 Februari 2012, pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan wawancara seperti yang dijelaskan oleh salah seorang anggota BKM “Margo Rukun Sejahtera” bahwa sumber keuangan BKM berasal dari Pemerintah melalui BLM untuk tiga bidang penanganan yakni, ekonomi, sosial dan lingkungan. Kemudian mengenai gaji insentif yang selama ini diberikan untuk anggota BKM dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat, seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) BKM “Margo Rukun Sejahtera” Kelurahan Mergosono pada BAB VI pasal 21 mengenai Sumber Dana BOP dan pasal 22 mengenai penggunaan dana BOP BKM yaitu :

Pasal 21 mengenai Sumber Dana BOP BKM

1. Program Penanggulangan Kemiskinan yang dialokasikan untuk BOP BKM yang berasal dari pemerintah melalui BLM, baik dari APBN maupun APBD.
2. Sebagian dari laba bersih kegiatan ekonomi bergulir yang dikelola oleh UPK.
3. Sumber dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 22 mengenai Penggunaan Dana BOP BKM

1. Operasional dan administrasi BKM yang dikelola oleh sekretariat BKM.
 2. Konsumsi kegiatan BKM untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
 3. Transport anggota BKM dan perangkatnya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai delegasi/utusan lembaga BKM dengan aturan sebagai berikut:
 - a. Untuk kegiatan di dalam kota maksimal Rp 20.000,- per orang
 - b. Untuk kegiatan luar kota maksimal Rp 50.000,- per orang atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dana yang ada serta tidak menyimpang dari RAPB BOP BKM.
 4. Iuran atas nama lembaga BKM, seperti FKA BKM, dll.
- (Sumber : BKM “Margo Rukun Sejahtera” Kelurahan Mergosono 2011)

Mengenai kegiatan yang telah berlangsung tahun 2011 sebagai bentuk hasil perencanaan dana. Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada anggota BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono menjelaskan :

“Pada tahun 2011 ini, dana yang diberikan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat ini yakni Rp. 200.000.000,- kemudian dana yang diberikan untuk tahun 2012 mendatang adalah sebesar Rp. 250.000.000,- . Melalui BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), BKM “Margo Rukun Sejahtera” telah melaksanakan beberapa kegiatan, baik kegiatan infrastruktur, sosial.”
Sumber : Wawancara, Selasa, 28 Februari 2012, pukul 11.00 WIB

Dari hasil wawancara kepada anggota BKM dapat diketahui bahwa dana yang turun dari pusat yang berasal dari dana APBN membagi kegiatan terus menerus turun setiap tahunnya , dan seperti yang terlihat pada tabel dana yang menungkapkan mengenai kegiatan yang terlaksana pada tahun 2011 sebagai laporan pertanggungjawaban BKM “Margo Rukun Sejahtera” dalam melaksanakan programnya.

Tabel 14
Dana APBN Tahap II yang terlaksana Tahun 2011

No	Nama KSM	Jenis Usulan Kegiatan	Lokasi	Nilai Usulan Kegiatan	Dana BLM-PNPM MP (Rp)	Dana dari Swadaya
1	Rehab Rumah	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RW6 RW 1	Rp. 47.893.500,-	Rp. 43.000.000, -	Rp. 4.893.500, -
2.	Warnet	Pengadaan Warnet	RW 4	Rp. 12.705.000,-	Rp. 12.000.000, -	Rp. 705.000,-
3.	Menjahit	Pengembangan menjahit	RW 3	Rp. 2.230.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 230.000,-
		Total		Rp. 62.828.500,-	Rp. 57.000.000,	Rp. 5.828.500,

Sumber : BKM "Margo Rukun Sejahtera" Kelurahan Mergosono 2011

b. Upaya membangun jaringan kerjasama

Badan Keswadayaan Masyarakat "Margo Rukun Sejahtera" kelurahan Mergosono yang merupakan lembaga dari rakyat untuk rakyat sebagai lembaga penanganan kemiskinan harus melakukan hubungan kerjasama baik secara internal maupun eksternal kelurahan Mergosono, dikarenakan kerjasama tersebut dapat meningkatkan penanganan kemiskinan sangat menentukan keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan. Diperlukan upaya membangun jaringan kerjasama kepada pihak-pihak/dinas terkait untuk penguatan lembaga dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada anggota BKM "Margo Rukun Sejahtera" kelurahan Mergosono mengungkapkan :

"Kerjasama yang dilakukan oleh BKM selama ini yakni kemitraan dari lembaga internal di kelurahan Mergosono saja yaitu dengan PKK, LPMK, RT RW, pengajian, dll. Untuk kerjasama dengan pihak lain maupun dinas terkait selama ini masih belum pernah namun hanya bekerjasama dalam hal diklat kerja dengan Balai Diklat. Kemudian, melihat dari pelaksanaan kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh BKM Margo Rukun Sejahtera untuk waktu ke depan, harapan BKM akan lebih meningkatkan kualitas kemitraan yang telah terbangun. Kemitraan yang diharapkan bisa berkelanjutan dan mendatangkan manfaat besar di masa depan adalah kegiatan perencanaan bersama, implementasi bersama, dan monitoring bersama antara BKM Margo Rukun Sejahtera dan pelaku-pelaku lainnya.

Sumber : Wawancara, Rabu, 15 Februari 2012 pukul 11.30 WIB

Dengan melihat hasil wawancara diatas dirasa kurang dalam membangun jaringan kerjasama dengan pihak-pihak terkait maupun dinas terkait. Sedangkan rencana program yang akan dilaksanakan oleh BKM dalam kegiatan kemitraan yang dilakukan pada tahun 2012 yang terpapar dalam laporan pertanggungjawaban BKM tahun 2011, antara lain :

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang PNPM
2. Pelatihan review keuangan, review program, review kelembagaan, KSM, UP-UP dan Sekretariat.
3. Kerjasama di bidang pembangunan infrastruktur dengan Dinas Kimpraswil.
4. Kerjasama dengan Dinas Koperasi.
5. Menjadikan kantor BKM sebagai pusat tempat kegiatan pelatihan lainnya bagi keluarga tidak mampu maupun anak-anaknya sehingga mereka mempunyai bekal ketrampilan maupun kepercayaan diri untuk bersaing dalam laju pembangunan ekonomi di era globalisasi, selain itu juga untuk mencegah anak-anak mereka dari child trafficking maupun menjadi anak-anak jalanan. Demikian juga bagi warga atau kepala keluarga (KK) yang menjadi tulang punggung keluarga dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), diharapkan pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan yang

diselenggarakan oleh BKM dapat dijadikan bekal mereka untuk mencari lapangan kerja baru yang lebih baik.

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban BKM 2011

Kemudian, masih dalam Laporan Pertanggungjawaban Badan Keswadayaan Masyarakat tahun 2011 yang dipaparkan pada Rapat Rembug Warga Tahunan pada tanggal 21 Februari 2012, mendiskripsikan mengenai prospek kemitraan BKM untuk kemajuan lembaga kedepannya, yaitu :

Prospek kemitraan BKM untuk tahun-tahun mendatang akan tetap terbuka dan akan tetap dikembangkan oleh BKM mengingat :

- BKM juga mempunyai potensi dan berusaha dengan bekerja sama memberantas kemiskinan yakni membentuk kemitraan dengan RT, RW, LPMK, Kelurahan dan dinas yang terkait untuk melaksanakan program-program yang menjadi sasaran dari MDG's (Millenium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Milenium) yang merupakan suatu komitmen dalam rangka penanggulangan kemiskinan, yang meliputi pelaksanaan 8 tujuan utama, antara lain :

1. Mengurangi kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lainnya
7. Menjamin keberlanjutan lingkungan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan khususnya di wilayah Kelurahan Mergosono maupun wilayah sekitarnya pada umumnya.

Berdasarkan paparan dalam laporan pertanggungjawaban dapat dilihat bahwa pada dasarnya rencana upaya membangun jaringan kerjasama yang dilakukan oleh lembaga BKM sangat baik dan menjangkau dalam penanganan kemiskinan. Kemudian melanjutkan mengenai upaya pembangunan jaringan kerjasama kepada salah seorang lembaga eksternal Badan Keswadayaan

Masyarakat namun masih dalam internal kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu Ketua RW mengungkapkan :

“Hubungan BKM dengan RW setempat kurang melakukan koordinasi, contohnya saja dalam hal pembentukan KSM untuk tahun 2012 ini. Pada saat pembentukan KSM 2012, KSM yang akan dibentuk kurang melakukan koordinasi dulu dengan RW setempat. Oleh sebab itu, dalam usulan rapat menegaskan kepada Ketua Koordinator BKM untuk sering melakukan koordinasi dalam hal pertemuan/rapat antara RW dan BKM. Dikarenakan RW kan pastinya sudah mengerti warganya yang kurang mampu atau dikategorikan sebagai warga miskin”.

Sumber : Wawancara, Jumat, 17 Februari 2012, pukul 10.00 WIB

c. Upaya sebagai mediator

BKM yang bergerak sebagai mediator dalam penanganan kemiskinan untuk masyarakat. BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono sebagai mediator dalam memberdayakan masyarakat miskin seperti yang terpapar dalam laporan review kelembagaan BKM tahun 2012, upaya sebagai mediator BKM antara pemerintah dan masyarakat dilakukan dengan cara :

1. BKM sebagai mediator atau sebagai pelaku lokal antara pemerintah dengan masyarakat miskin dengan melakukan usaha-usaha yang dapat membantu mengatasi kemiskinan dan membantu masyarakat dalam mengelola usaha yang telah dilakukan dengan bantuan dana PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini dilakukan dengan pelatihan KSM dan membantu KSM untuk kegiatan promosi ke masyarakat se kelurahan. Dan juga membantu memfasilitasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi KSM.
2. BKM melakukan jaringan usaha dengan tetap mengontrol usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KSM.

3. BKM berfungsi sebagai mediator bagi pemerintah dalam perguliran dana yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat, yang dapat bermanfaat agar dana yang bergulir tersebut dapat dijadikan sebagai modal usaha yang mereka buat. Tak lepas bahwa kegiatan-kegiatan KSM juga diawasi oleh BKM dalam program perguliran tersebut, yakni dalam hal membuat rekapan tunggakan, merencanakan langkah-langkah agar dapat menekan tunggakan KSM. Dalam hal ini BKM bertanggungjawab terhadap jalannya perguliran dana.

d. Upaya Sarana dan Prasarana Kelembagaan

Sarana dan prasarana yang merupakan kebutuhan BKM agar dapat dengan lancar menjalankan tugas, peran dan kewajiban di masyarakat. Oleh karena itu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BKM akan sangat mempengaruhi kinerja BKM itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Unit Pengelola Keuangan BKM Margo Rukun Sejahtera mengungkapkan bahwa :

“Penyediaan sarana dan prasarana ini didapat dari bermacam-macam sumber, dari kelurahan Mergosono sendiri dan dari hasil keuntungan dana yang digulirkan kepada masyarakat, keuntungan tersebut oleh BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono ini sebagian kecil diwujudkan dalam bentuk inventaris BKM. Dikarenakan inventaris yang ada pada BKM ini sudah lama digunakan, maka memerlukan perbaikan seperti printer yang ada di BKM “Margo Rukun Sejahtera” ini yang telah rusak 2 bulan ini, hal tersebut menimbulkan berbagai hambatan dalam hal penyelesaian tugas-tugas yang telah ada. Akibatnya tugas-tugas yang ada kurang dapat terselesaikan dengan lancar. ”

(Sumber : Wawancara, Rabu, 29 Februari 2012, pukul 10.00 WIB).

Adapun inventaris yang dimiliki oleh BKM dengan kondisi kelayakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14
Inventaris BKM "Margo Rukun Sejahtera" tahun 2012

No	Tanggal Pembelian	Jenis Inventaris	KONDISI
1	01 Juni 2004	COMPUTER SPC	Kurang layak
2	26 Oktober 2004	FILLING CABINET	Kurang layak
3	08 Nopember 2004	TV 16 DIGITEC	Kurang layak
4	09 Nopember 2004	PLAKAT BKM	Kurang layak
5	11 Nopember 2004	Kursi untuk nasabah 19 buah	Kurang layak
6	04 Juli 2005	Lemari Buku	Kurang layak
7	04 Juli 2005	Jam Dinding Mirado	Kurang layak
8	04 Juli 2005	Kipas Angin Twin Dog	Kurang layak
9	04 Juli 2005	Melamin 2 Buah	Kurang layak
10	04 Juli 2005	Foto Presiden Wakil dan Garuda	Kurang layak
11	04 Juli 2005	Meja Tulis 4 buah	Kurang layak
12	04 Juli 2005	Kursi Lipat 4 Buah	Kurang layak
13	27 November 2007	Kamera	Kurang layak
14	28 November 2007	Printer	Kurang layak
15	13 Desember 2007	Infus printer	Kurang layak
16	2 Agustus 2008	Kipas dinding (1 buah) Kipas atas (2 buah)	Kurang layak
17	22 Agustus 2008	Pesawat Telpon + kunci Venus AK 100	Kurang layak

Sumber : Data Inventaris BKM "Margo Rukun Sejahtera" tahun 2011

e. Upaya Penanganan Kemiskinan Perkotaan

Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat "Margo Rukun Sejahtera" di kelurahan Mergosono dalam menangani kemiskinan masyarakat mergosono melalui program PNPM Mandiri Perkotaan. Upaya penanganan kemiskinan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pihak BKM "Margo Rukun Sejahtera" dapat dijelaskan, berdasarkan hasil wawancara kepada koordinator BKM "Margo Rukun Sejahtera" menjelaskan bahwa :

"BKM "Margo Rukun Sejahtera" dalam menangani kemiskinan yang ada di kelurahan Mergosono ini, dengan apa yang tertera pada rencana Pembangunan Jangka Menengah "Pronangkis" (Program Penanggulangan Kemiskinan) yang menyangkut pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan yang dipetakan dalam kegiatan TRIDAYA (ekonomi, sosial, lingkungan). Yang tentunya dapat bermanfaat sebagai sarana prioritas pembangunan di Kelurahan Mergosono ini. Yang pelaksanaannya dilakukan dengan apa permasalahan yang ada.

Sumber : wawancara, senin, 12 Maret 2012, pukul 11.10 WIB

Mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh Koordiantor BKM bahwa dalam penanganan kemiskinan sudah menjangkau untuk permasalahan dalam hal kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Yang tertuang dalam rencana PJM Pronangkis Kelurahan Mergosono agar dapat menangani dengan cepat dan tanggap. Permasalahan tersebut dipetakan dalam kegiatan TRIDAYA yaitu kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan yang setiap kegiatan ini dilihat menurut banyaknya permasalahan kemiskinan. Sementara dapat dilihat dari ekonomi (peminjaman bergulir). Peminjaman adalah kelompok KSM dengan anggota

minimal 3 orang. Berdasarkan hasil wawancara dari Unit Pengelola Keuangan.

Adapun syarat peminjaman bagian ekonomi yaitu :

1. Peminjaman untuk mengembangkan usaha yang tidak melanggar ketentuan bukan untuk menunjang kepentingan militer/politik.
2. Besar pinjaman pertama maksimal Rp. 500.000,- atau disesuaikan dengan usaha dan kemampuan bayar besar pinjaman berikutnya tergantung pada pembayaran kembalinya dan besar pinjaman terakhir maksimal Rp. 2.000.000,-
3. Jasa peminjaman ditetapkan 1,5% perbulan di hitung dari pokok pinjaman semula dan dibayar bersamaan dengan angsuran pokok pinjaman.
4. Jangka waktu pinjaman 10 bulan
5. Angsuran pinjaman maksimal bulanan.

Sumber : wawancara, senin, 12 Maret 2012, pukul 12.00 WIB

Dari hal yang telah disampaikan Unit Pengelola Keuangan, upaya dalam penanganan kemiskinan untuk membantu perekonomian masyarakat dilakukan dengan memberi pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk KSM ekonomi.

Selanjutnya dari hasil wawancara kepada pemanfaat dana PNPM Mandiri

Perkotaan memaparkan :

"Pinjaman dari dana PNPM mandiri Perkotaan telah digunakan untuk tambahan modal membuka warung lalapan depan rumah, bunga yang harus dibayar memang sedikit memberatkan dengan membayar sebesar 1,5 %, dan mengharapkan sekali agar bunga tersebut dikurangi 0,5% persenlah untuk mengurangi beban dikarenakan juga harus membuat kelompok minimal 3 orang, hal tersebut tentu saja membuat semakin rumit dan kurang efektif?"

Sumber : wawancara, rabu, 14 Maret 2012, pukul 16.00 WIB

Jadi, apa yang sudah dipaparkan oleh pemanfaat dana PNPM Mandiri Perkotaan yakni KSM dalam bidang ekonomi bahwa masih kurang efektif dengan membuat kelompok 3 orang untuk peminjaman dana bergulir. Kemudian menuju warnet yang berada di RW 6, yang merupakan hasil upaya BKM dalam

kontribusinya untuk membuka lapangan pekerjaan sebagai bentuk pemetaan hasil KSM di bidang sosial untuk membantu masyarakat untuk pemberantas pengangguran. Dari hasil wawancara kepada salah seorang penjaga warnet yang merupakan KSM sosial memaparkan :

”Dengan adanya warnet ini sangat bermanfaat sekali melalui dana PNPM Mandiri Perkotaan untuk mengurangi pengangguran yang ada di kelurahan Mergosono ini, warnet yang dikelola oleh KSM sosial dapat bekerja di warnet ini untuk menambah penghasilan dan merupakan sarana pendidikan untuk anak tidak mampu.”

Sumber : wawancara, Kamis, 15 Maret 2012 pukul 18.20 WIB.

Upaya penanganan kemiskinan BKM dalam bidang fisik, dapat dilihat pada kegiatan tahun 2011 adanya perbaikan rumah tidak layak huni, sedangkan perencanaan untuk tahun 2012 mendatang yakni rehab rumah dan MCK, pembuatan plengsengan. Penjabaran rencana kegiatan definitif dapat dilihat pada halaman lampiran.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Memberdayakan Badan Keswadayaan Masyarakat

a. Faktor Pendukung

Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Lembaga Lokal yakni Badan Keswadayaan Masyarakat untuk mengetahui faktor pendukung dalam memberdayakan kelembagaannya pada hasil kegiatan penanganan kemiskinan perkotaan, Menurut hasil wawancara kepada salah satu anggota PK Badan Keswadayaan Masyarakat mengungkapkan bahwa :

”Faktor pendukung yang ada selama ini berasal dari dana yang berasal dari pemerintah setiap tahunnya melalui Bantuan Langsung Masyarakat yang diberikan kepada BKM ”Margo Rukun Sejahtera” pada tahun 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- kemudian tahun 2012 yang telah direncanakan akan cair sebesar Rp 250.000.000,-. Kami disini merupakan bekerja dengan rasa sosial dan tidak dibayar.

Sumber : Wawancara, Rabu, 29 Februari 2012, pukul 10.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara kepada anggota PK BKM telah menyebutkan bahwa faktor pendukung yang sangat menentukan pergerakan kemajuan penanganan adalah dana dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Selanjutnya faktor pendukung lain yang mempengaruhi upaya pemberdayaan lembaga BKM dalam menangani kemiskinan perkotaan. Dari hasil wawancara kepada Pimpinan Kolektif BKM memaparkan :

”Selain adanya dana yang setiap tahun turun dari pemerintah melalui Bantuan Langsung masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat ini telah didukung oleh lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan program-programnya, adapun lembaga yang sudah menjalin kemitraan dengan Badan Keswadayaan Masyarakat adalah RT, RW, PKK, LPMK, Karangtaruna, dan pihak kelurahan Mergosono sendiri yang telah membantu dalam melaksanakan program-programnya. Dukungan dari RT, RW.”

Sumber : Wawancara, Rabu, 29 Februari 2012, pukul 10.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh pimpinan kolektif Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang dapat digaribawahi bahwa faktor pendukung yang selama ini yang ada dalam memberdayakan lembaga dalam penanganan kemiskinan perkotaan adalah bantuan langsung masyarakat (dana BLM) dan kemitraan dengan lembaga internal kelurahan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang menjadi kendala BKM dalam memberdayakan lembaganya sebagai upaya penanganan kemiskinan perkotaan. Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu anggota PK BKM Margo Rukun Sejahtera, memaparkan bahwa

”Selama ini yang paling menghambat dalam perkembangan BKM yaitu anggota BKM kurang adanya keharmonisan dalam menentukan kebijakan. Dikarenakan hal itu juga karena PK BKM kalau diundang rapat tidak dapat hadir dikarenakan ada keperluan. Ini membuktikan ternyata pilihan masyarakat juga tidak selalu tepat, terbukti bahwa BKM berjalan belum satu tahun sudah tidak utuh lagi, karena sebagian memilih aktif pada kegiatan masing-masing dan tidak sanggup karena tugasnya berat. Dapat dilihat, bahwa anggota BKM pada saat pelaksanaan program 1 Tahun ini, yakni tahun 2011 banyak yang mengundurkan diri sebanyak 5 orang, namun sampai saat ini masih belum diadakan prekrutan anggota baru. Apalagi ditambah BKM ”Margo Rukun Sejahtera” ini masih belum mempunyai sekretariat baru, sekretariat lama mengundurkan diri sejak juli 2011 Sekretariat BKM tidak ada sehingga menghambat sistem administrasi BKM ”Margo Rukun Sejahtera”,
Sumber : Wawancara, Rabu, 29 Februari 2012, pukul 11.00 WIB.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban BKM Margo Rukun Sejahtera di kelurahan Mergosono 9 januari 2012, menjelaskan beberapa hambatan atau permasalahan yang terjadi selama periode kepengurusan tahun 2011 adalah :

- a. Kurangnya aktif sebagian Pimpinan Kolektif BKM Margo Rukun Sejahtera pada masa kepengurusan.
- b. Masih kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BKM.
- c. Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat bahwa BKM Margo Rukun Sejahtera adalah suatu lembaga pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sebagai lembaga keuangan semata.

- d. Kurangnya kesadaran KSM Ekonomi Produktif yang mengakibatkan terhambatnya dana yang seharusnya dapat disalurkan kembali kepada anggota masyarakat.

(Sumber : Laporan pertanggungjawaban BKM 2011)

Kemudian, hambatan yang tertuang dalam laporan review kelembagaan pada periode kepemimpinan 2011 adalah sebagai berikut :

- Hambatan internal BKM yakni, BKM tidak ada time schedule yang jelas, undangan rapat tidak sampai ke tujuan, laporan UP-UP terlambat dan UP-UP tidak semuanya aktif, kurangnya rasa peduli, kesadaran dan rasa mampu diantara anggota BKM, kurang adanya motivasi dan di tahun 2011 ini tidak ada sekretariat.
- Hambatan eksternal BKM yakni, BKM jarang terjun ke masyarakat dan masyarakat kurang mengenal BKM, KSM kurang rangsangan dan merasa perlu prosedural, perlu adanya bantuan dari lembaga lain.

Kemudian, salah satu faktor penghambat dalam pemberdayaan kelembagaan adalah faktor modal. BKM "Margo Rukun Sejahtera" di kelurahan Mergosono juga mempunyai kendala dalam permodalan dikarenakan ketidaklancaran pembayaran angsuran dari para peminjam dana bergulir hal ini dapat dilihat dari daftar tunggakan KSM pada bulan Januari 2012 yang dapat dilihat pada halaman lampiran.

Menurut hasil penelitian diatas, dapat diketahui dalam memberdayakan lembaganya BKM "Margo Rukun Sejahtera" mempunyai banyak kendala dan persoalan yang harus dihadapi.

C. Analisis Data

1. Upaya pemberdayaan Badan Keswadayaan Masyarakat

Agar dapat memberdayakan masyarakat dengan benar dalam menangani kemiskinan, Badan Keswadayaan Masyarakat yang awalnya terjadi melalui Kelurahan dan termasuk usulan masyarakat yang ada di wilayah kelurahan. Perlu memberdayakan lembaganya karena sangat dirasa penting dalam hal penguatan kelembagaannya terlebih dahulu sebagai pondasi keberhasilan program.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono dapat dilihat dalam pengertian pemberdayaan menurut Ife (1995:13) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “*empowerment*” yang berarti berdaya, memberi daya, memberi “*power*” (kuasa), kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya. Segala potensi yang dimiliki oleh pihak yang kurang berdaya itu ditumbuhkan, diaktifkan, dikembangkan sehingga mereka memiliki kekuatan untuk membangun dirinya., dimana pemberdayaan yang dilakukan dalam konsep PNPM mandiri perkotaan untuk pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh organisasi/lembaga dari rakyat untuk rakyat, pada dasarnya merupakan pihak yang kurang berdaya kemudian diarahkan agar mampu untuk menguasai kehidupannya secara mandiri. Melalui rembug warga dengan Badan Keswadayaan Masyarakat, masyarakat dipilih menjadi pimpinan kolektif untuk mengurus BKM, kemudian lembaga tersebut yang paling berkuasa untuk dapat

mengatasi permasalahan yang ada di wilayahnya terutama permasalahan kemiskinan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh BKM “Margo Rukun Sejahtera” sebagai tujuan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yang ada; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Parsons et.al (dalam Soeharto, 2006:66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Walaupun dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual namun tetap saja pada gilirannya strategi ini akan berkaitan dengan kolektivitas. Pemberdayaan dapat dilakukan pada tiga aras pemberdayaan (*empowerment setting*).

a. Aras mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu, baik bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas. (*Task Centered Approach*). Dalam hal ini, dimaksudkan dalam BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono telah melalui tahapan yang sudah diberikan bekal pelatihan maupun bimbingan dari pemerintah

untuk tugas individu para pengurus BKM, agar setiap individu yang ada dalam lembaga mampu menjalankan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap individu dapat meningkatkan kemampuannya dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada.

b. Aras mezzo

Pemberdayaan yang telah dilakukan terhadap sekelompok klien pemberdayaan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Dalam hal ini, BKM “Margo Rukun Sejahtera” dapat dikatakan sudah memasuki tahapan pemberdayaan dalam aras mezzo. BKM sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan agar BKM tersebut bertindak seperti media intervensi dalam menentukan kebijakan untuk pemecahan masalah yang dihadapi baik masalah dari internal maupun eksternal BKM.

c. Aras makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*Large System Strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang masyarakat sebagai orang yang mempunyai kompetensi untuk mamahami situasi-situasi

mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Dalam hal ini, BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono belum sampai pada tahap ini dikarenakan belum mempunyai strategi sendiri yang tepat untuk memberantas kemiskinan secara luas.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan BKM selaku lembaga lokal dari rakyat untuk rakyat sebagai upaya untuk menangani kemiskinan yang dimulai dari upaya pemberdayaan lembaganya sendiri.

a. Upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga BKM

Dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga, yakni dilakukan penguatan kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat khususnya BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono dapat dilakukan melalui tiga tahapan seperti yang diungkapkan oleh Williem. Dalam tahapan yang diungkapkan Williem penguatan kelembagaan dapat dilakukan terlebih dahulu melalui level individu, setelah ada peningkatan level organisasi dapat dilanjutkan melalui level organisasi setelah itu dapat dilanjutkan kepada level yang tertinggi yakni level kemampuan atau peningkatan kapasitas. Dimana setiap level itu membawa perubahan yang berarti kepada Badan Keswadayaan Masyarakat “Margo Rukun Sejahtera” sebagai *Agent of change*. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan, pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang

mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. (Soekanto, 1992:273). Dalam hal ini, BKM “Margo Rukun Sejahtera” merupakan sekelompok orang yang membentuk adanya organisasi mendapat kepercayaan sebagai pemimpin dalam memberantas kemiskinan yang ada diwilayah kelurahan Mergosono. Kemudian akan dijelaskan mengenai bagaimana BKM “Margo Rukun Sejahtera” dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan yang tercermin dari level individual, level organisasi dan level system.

a.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (Level Individual)

Tekanan pada level individual adalah bagaimana individu dalam organisasi dapat meningkatkan kemampuannya sehingga memberikan kontribusi terhadap kapasitas pada level yang berada di atasnya. (Williem, 2003:12)

Dalam hal ini, BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono belum dapat sepenuhnya meningkatkan kemampuan setiap individunya melainkan hanya pada kemampuan pengurusnya, yakni pada bimbingan dan pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah dalam pemberdayaan lembaganya setempat dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Dalam pengembangan kapasitas kelembagaannya, BKM telah melaksanakan pelatihan-pelatihan yang telah diberikan untuk meningkatkan kemampuan / pemberdayaan terhadap sumber daya manusia yang ada di BKM. Dalam hal ini, GTZ mengungkapkan mengenai pemberdayaan dapat dilakukan dengan adanya upaya

pengembangan/peningkatan kapasitas (*capacity building*). *Capacity building* menurut pernyataan GTZ adalah sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, masyarakat, dan system untuk :

1. Menganalisis lingkungan

Peningkatan kapasitas individu, kelompok, organisasi, masyarakat, dan system ditunjukkan dengan kemampuan dalam menganalisis lingkungan dimana mereka tinggal. Peningkatan kapasitas ini ditunjukkan dengan kepekaan terhadap berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dan mampu menganalisis fenomena tersebut. Dalam hal ini, BKM telah mampu menganalisis lingkungan dengan bantuan RT dan RW setempat, maupun relawan. Apa yang menjadi masalah dalam fenomena sekitar dan mampu menganalisis masalah khususnya masalah lingkungan untuk pembangunan.

2. Mengidentifikasi masalah, kebutuhan, peluang

Setelah menemukan permasalahan yang ada dalam analisis lingkungan kita perlu mengidentifikasi permasalahan tersebut atau memahami permasalahan tersebut secara lebih mendalam, lalu peningkatan kapasitas ditandai pula dengan mampu mengidentifikasi kebutuhan dan peluang yang ada untuk dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini BKM “Margo Rukun Sejahtera” sudah mampu mengidentifikasi kebutuhan dan peluang untuk dapat dimanfaatkan dalam pengembangan organisasi untuk pengentasan kemiskinan.

Permasalahan-permasalahan yang ada masih dalam proses penanggulangan. Dalam hal BKM sudah mampu mengidentifikasi masalah kemiskinan, contohnya saja pengangguran yang ada di kelurahan Mergosono sedikit demi sedikit dapat teratasi dengan dibukanya wirausaha dan pelatihan-pelatihan meskipun belum sepenuhnya terlaksanakan. Kemudian sarana dan prasarana umum yang kurang, seperti akan dibangunnya MCK di rumah penduduk yang dekat dengan hantaran sungai. Hal ini merupakan salah satu contoh BKM dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan peluang untuk pengentasan kemiskinan masyarakat miskin.

3. Merumuskan strategi sesuai dengan identifikasi masalah dan kebutuhan
BKM sudah mampu merumuskan strategi yang akan dilaksanakan dengan bantuan faskel-faskel, LPMK, RT dan RW setempat untuk mengatasi masalah dengan kebutuhan yang ada dalam hal pengentasan kemiskinan.
4. Merancang rencana aksi
BKM “Margo Rukun Sejahtera” telah dapat merancang rencana aksi, seperti perencanakan definitif rencana anggaran kegiatan tahun 2012 mendatang. Hal tersebut dapat direncanakan melalui pelatihan KSM yang dilakukan dengan tiap perwakilan RW setempat.
5. Menggunakan secara efektif dan keberlanjutan sumber daya untuk mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi rencana aksi.

Dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan, sumber daya manusia yang ada di BKM “Margo Rukun Sejahtera” telah mampu

mengimplementasikan dengan membentuk KSM dan melakukan kebijakan dalam hal pelaksanaan bersama dengan Faskel, memonitor KSM dalam melaksanakan kegiatan, dan BKM telah mampu mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas organisasi, hal ini sangat efektif demi keberhasilan penanggulangan pengentasan kemiskinan.

6. Menggunakan umpan balik sebagai proses pembelajaran.

Jika di BKM “Margo Rukun Sejahtera” perencanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan, hal ini menjadi umpan balik terhadap proses pembelajaran di masa yang akan datang.

(GTZ, 2003:17)

Dalam pengembangan kapasitas kelembagaan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada didalamnya, dimana hal itu juga terdapat pada BKM “Margo rukun sejahtera”. Sebelum mengembangkan masyarakat harus mengembangkan sumber daya manusia yakni setiap individu yang ada didalam organisasi, seperti diberi motivasi, pelatihan-pelatihan, dll.

a.2 Pengembangan kelembagaan (Level organisasi)

Tampilan dari organisasi juga merupakan sebuah kunci untuk mengukur kapasitas kelembagaannya. Membangun pemahaman yang kuat yang memotivasi antara public dan privat organisasi dan apa struktur insentif mereka adalah bagian penting untuk memastikan efektivitas distribusi dari beberapa kebijakan. Organisasi

harus memiliki misi yang jelas, dapat bersaing, memiliki sumber daya yang tepat dan praktik manajemen yang sesuai dengan misi. (Williem, 2003:13)

Dalam hal ini, setelah level individu dapat terlalui, kemudian menginjak level organisasi BKM sudah dapat dikatakan berdaya dikarenakan telah menentukan kebijakan sendiri dalam hal mengatasi persoalan yang ada dengan mengadakan rapat seluruh anggota BKM yang berjumlah 13 orang dalam penentu kebijakan. Dan sebagian besar sudah bergerak sesuai dengan azas, misi, visi, tujuan dan maksud yang diperuntukkan dalam praktik manajemen BKM.

Hal itu tercermin dalam peranan utama seorang agen perubahan yaitu (Nasution, 2004:129):

- 1) Sebagai katalisator, menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan perubahan.
- 2) Sebagai pemberi pemecahan persoalan.
- 3) Sebagai pembantu proses perubahan: membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta member petunjuk mengenai bagaimana
 - a. Mengenal dan merumuskan kebutuhan
 - b. Mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan.
 - c. Mendapatkan sumber-sumber yang relevan

- d. Memilih atau menciptakan pemecahan masalah
 - e. Menyesuaikan dan merencanakan pentahapan pemecahan masalah.
- 4) Sebagai penghubung (linker) dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Dengan melihat teori diatas, tercermin dalam peranan *Agent of Change* bahwa BKM “Margo Rukun Sejahtera” dalam pengembangan kelembagaannya (level organisasi) dapat memecahkan setiap permasalahan yang ada.

Sebagai katalisator yakni dapat mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu melakukan perubahan, hal tersebut tercermin dalam pengakuan dan dukungan dari masyarakat kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dapat dilihat pada beberapa pengertian teori mengenai pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan yang dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu :

- a. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

- c. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas dengan kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (persaingan yang tidak sehat) antara kelompok kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang melakukan kesempatan berusaha. (Suharto, 2006:67).

Pengakuan dan dukungan dari masyarakat dapat terlihat dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan rapat untuk perencanaan pembangunan dan mendukung dengan bantuan kerja, adanya KSM di tiga bagian yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam KSM lingkungan diperlukan gotong

royong dalam pembangunan fisik yang dilaksanakan. Pelaksanaan proses dan tujuan pemberdayaan tersebut turut serta membantu dalam proses pembangunan segala aspek yakni ekonomi, lingkungan, kesehatan, dll. Dengan melihat teori di atas, dapat dilihat pada pendekatan pemberdayaan dalam hal aspek penyokongan, dimana masyarakat diberi dukungan dan bimbingan agar mampu menjalankan tugas-tugas yang diberikan untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat terlihat pada, banyaknya KSM maupun relawan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan BKM “Margo Rukun Sejahtera” masyarakat telah mendukung dan pengakuan terhadap BKM dalam program PNPM Mandiri Perkotaan yang jumlahnya 200 KSM lebih. Selanjutnya pada KSM ekonomi diberi modal untuk proses ekonomi produktif dan KSM lingkungan dan sosial diberi modal dalam pembangunan sarana dan prasarana umum maupun sosial. BKM juga bertanggungjawab melakukan kontrol terhadap kinerja KSM. Dalam hal ini, BKM yang menjalankan kebijakan dan KSM yang melaksanakan kegiatan.

Pengakuan dan dukungan masyarakat dapat terlihat dengan sosialisasi BKM ke masyarakat sekitar, dan pada kenyataannya maupun yang ada pada laporan review kelembagaan BKM, BKM “Margo Rukun Sejahtera” belum dapat berhasil mensosialisasikan kepada masyarakat keseluruhan kelurahan. Akibatnya masyarakat yang awam tidak tahu menahu mengenai program penanggulangan kemiskinan perkotaan maupun terkadang kepada lembaga lokal yakni BKM itu sendiri.

Kemudian BKM juga telah melaksanakan kerjasama terhadap berbagai pihak seperti RT, RW, LPMK, yang merupakan upaya dorongan dan dukungan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan.

a.3 Level system (kemampuan)

Level kemampuan atau kapasitas menunjukkan keterikatan yang erat satu sama lainnya, termasuk pada level organisasi. Terdapat beberapa faktor yang terlihat kritis atas kinerja *network*, seperti kemampuan memastikan partisipasi dari aktor-aktor kunci, kemampuan dari aturan prosedur, dan penyediaan keuangan untuk jaringan itu sendiri, alokasi yang tepat tentang tanggungjawab, kewenangan organisasi menunjang koordinasi dan juga yang terpenting stabilitas dari susunan institutional. (Williem, 2003:13)

Dalam hal ini, BKM “Margo Rukun Sejahtera” belum dapat dikatakan berdaya dalam level kemampuan. Dikarenakan BKM belum bisa mandiri dengan mendapatkan bantuan dari pihak eksternal, dalam hal keuangan dan kerjasama atau jaringan.

BKM belum dapat dikatakan mandiri dalam penyediaan modal dalam penanganan kemiskinan dalam hal ini BKM belum sampai pada level kemampuan. BKM “Margo Rukun Sejahtera” sebagai penyedia modal yang telah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur modal yang diberikan dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sarana dan prasarana umum untuk program

pembangunan. Kemudian melihat teori dalam keterkaitannya untuk sebuah program yang banyak berhubungan dengan proyek pembangunan Negara dunia ketiga, *capacity building* telah menjadi bagian pembahasan dalam lembaga internasional. Menurut UNDP (dalam Edralin, 1997:148) untuk *capacity building* difokuskan pada tiga dimensi, yaitu :

- a. Tenaga kerja, yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan
- b. Modal (dimensi fisik) menyangkut sarana material, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan ruang/gedung.
- c. Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi, serta sistem informasi manajemen.

Dalam melihat teori diatas terdapat dimensi dalam *capacity building*, yaitu modal yang sangat dibutuhkan dalam hal apapun, menyangkut sarana material, peralatan, dll. Aspek permodalan ini sangat berguna dalam sebagai upaya pengembangan kelembagaannya. Tanpa modal BKM tidak dapat menjalankan program-programnya. Modal yang diberikan Pemerintah melalui Bantuan Langsung pada tahun 2011 yang lalu BKM “Margo Rukun Sejahtera” telah diberikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- dan jatah Bantuan Langsung Masyarakat pada tahun 2012 sebesar Rp. 250.000.000,-. Dalam hal ini, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang telah diberikan Pemerintah untuk BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono tergolong cukup lancar untuk program-program yang akan dilaksanakan.

Modal ini dimaksudkan agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan juga memberdayakan lembaga BKM itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya terkadang terdapat hambatan yang dialami BKM “Margo Rukun Sejahtera” seperti ketidaklancaran perguliran dana, maupun kesalahan penggunaan dana yang dimanfaatkan oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Permasalahan permodalan memang menjadi kendala dalam BKM untuk memberdayakan lembaganya, meski hal tersebut telah diupayakan secara terus-menerus dengan berbagai strategi, namun tetap saja bermasalah, hal ini dapat diketahui dengan masih saja terjadi penunggakan yang menyebabkan tidak lancarnya perguliran dana.

b. Upaya membangun jaringan kerjasama

Dalam peningkatan kapasitas kelembagaan World bank menekankan perhatian pada :

1. Pengembangan sumber daya manusia: training, rekrutmen, dan pemutusan pegawai professional, manajerial dan teknis.
2. Keorganisasian : yaitu pengembangan struktur, proses, sumber daya dan gaya manajemen.
3. Jaringan kerja (*Network*) : berupa koordinasi, aktivitas organisasi, fungsi *network*, serta interaksi formal dan informal.

4. Lingkungan organisasi : yaitu aturan (rule) dan undang-undang legislation yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antar lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi development task, serta dukungan keuangan dan anggaran.
5. Lingkungan kegiatan luas lainnya : meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi-kondisi yang mempengaruhi kinerja.

Dalam peningkatan kapasitas kelembagaan BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono dapat dilihat pada perhatian dalam kapasitas kelembagaan yang telah dikemukakan oleh World bank, dalam hal ini peningkatan kapasitas nomor 4, yakni jaringan kerja (*network*) berupa koordinasi, aktivitas organisasi, fungsi *network*, serta interaksi formal dan informal dapat membantu penguatan kelembagaannya. Dengan melakukan koordinasi maupun hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, maka BKM “Margo Rukun Sejahtera” dapat terbantu untuk menguatkan program-program yang akan dilaksanakannya. Namun, pada kenyataannya BKM “Margo Rukun Sejahtera” ini masih merencanakan dan selama ini hanya melakukan hubungan kemitraan dengan internal kelurahan seperti RT, RW, LPMK, Pengajian, dll.

Dengan internal kelurahan, seperti yang telah dijelaskan bapak Ketua RW saja masih terjadinya *mist communication* atau kurangnya koordinasi yang telah dibentuk antara BKM dengan RT, RW setempat. Seperti kurangnya diadakan rapat antar BKM dan internal kelurahan dan juga pada pemanfaatan hasil kewirausahaan yang

dilakukan BKM kurang dapat berhasil secara menyeluruh ke masyarakat luas kelurahan Mergosono. Hal ini dapat menghambat proses PNPM Mandiri Perkotaan untuk mengentaskan kemiskinan, dikarenakan RT dan RW setempat pastinya lebih tahu ekonomi masyarakat yang miskin ataupun pembangunan fisik di wilayahnya. Dengan ini, sangat penting sekali dalam proses pelaksanaan pemanfaatan PNPM Mandiri Perkotaan.

Kemudian fakta yang ada di lapangan, BKM “Margo Rukun Sejahtera” dalam melakukan hubungan kemitraan dengan external kelurahan seperti hubungan kemitraan dengan dinas-dinas yang terkait tergolong belum melakukan kemitraan dan masih merencanakan untuk melakukan kemitraannya terhadap dinas-dinas terkait kedepannya. Karena sebenarnya sangat penting sekali dalam melakukan kemitraan dengan luar agar mengetahui strategi baru untuk peningkatan kapasitas kelembagaannya dan sumber daya alamnya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu melaksanakan program-program pembangunan fisik maupun pengentasan kemiskinan yang ada di kelurahan supaya berdaya guna.

c. Upaya sebagai mediator

Lembaga lokal mempunyai peranan yang penting dalam melaksanakan tugasnya dalam berbagai peranan lembaga lokal yaitu :

a. Informasi

Lembaga lokal menyajikan data sejumlah permasalahan dan kebutuhan masyarakat lokal, baik menyangkut permasalahan ekonomi, sosial dan budaya, dan mencoba menemukan alternatif pelayanan sosial yang dibutuhkan.

b. Mediator dan Fasilitator

Kadangkala terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan dengan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Adanya kesenjangan ini akan mengakibatkan “terjadinya konflik” antara kepentingan dengan kebutuhan masyarakat. Pada batas-batas tertentu, masyarakat tidak akan mendukung kegiatan pembangunan ini. Lembaga lokal pun berkewajiban untuk dapat sebagai mediator bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di daerahnya dan fasilitator dalam melaksanakan kegiatan yang berada di daerahnya.

c. Advokasi

Lembaga mewakili kepentingan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya dari pihak-pihak tertentu. Ketika ada pihak lain (pemerintah lokal, pengusaha) yang menawarkan program kepada masyarakat, namun program tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat, maka organisasi lokal atas nama kepentingan masyarakat lokal akan melakukan upaya pembelaannya. Seperti misalnya dalam pembebasan tanah untuk kepentingan perumahan atau industry, atau pembangunan industri yang polusinya dirasakan masyarakat.

d. Pemberdayaan

Lembaga lokal melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi masyarakat. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh organisasi lokal, maka masyarakat secara swadaya dapat melaksanakan permasalahannya baik dalam bidang ekonomi, sosial politik dan budaya.

([http :// www.Balatbangsos_depsos.com](http://www.Balatbangsos_depsos.com))

Peran kelembagaan lokal, khususnya BKM “Margo Rukun Sejahtera” dapat dilihat dalam teori yang ada diatas, peran kelembagaan lokal yakni, informasi, mediator dan fasilitator, advokasi, dan pemberdayaan. Dalam hal ini, BKM sudah menjalankan salah satu peran untuk penguatan kelembagaannya yakni mediator, dikarenakan peran kelembagaan lokal atau BKM ini sangat penting untuk keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan maupun percepatan yang tertuang dalam Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan) yang dilakukan setiap tiga tahun. Selanjutnya kemampuan BKM menjalankan perannya di masyarakat dapat mengukur tingkat pemberdayaan lembaga tersebut sebagaimana mestinya, pihak BKM dapat memberdayakan kelembagaan terlebih dahulu sebagai pondasi awal terciptanya hubungan yang selaras.

Peran BKM “Margo Rukun Sejahtera” sebagai mediator BKM sebagai mediator atau pelaku sosial antara pemerintah dengan masyarakat miskin, BKM merupakan lembaga yang melakukan usaha-usaha untuk membantu mengatasi kemiskinan dan membantu masyarakat dalam penciptaan usaha yang telah dilakukan dengan bantuan dana PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini dilakukan dengan pelatihan

KSM dan membantu KSM untuk kegiatan promosi ke masyarakat se kelurahan. Dimaksudkan agar masyarakat dilatih untuk berwirausaha. Dan juga membantu dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi KSM. BKM berperan aktif sebagai mediator dalam hal melakukan jaringan usaha kepada KSM dengan tetap mengontrol usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KSM.

BKM berfungsi sebagai mediator antara pemerintah kepada masyarakat dalam penyaluran dana yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat dan pembangunan fisik untuk sarana dan prasarana umum. Kemudian, dalam hal ekonomi manfaat dana yang bergulir dapat dijadikan sebagai modal usaha mereka melalui KSM golongan ekonomi. Tak lepas bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dibentuk BKM melalui KSM juga diawasi oleh BKM dalam program tersebut, yakni dalam hal membuat rekapan tunggakan, merencanakan langkah-langkah agar dapat menekan tunggakan KSM agar dana yang digulirkan tidak mengalami kemacetan.

Hal tersebut merupakan peran BKM sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat sangat berperan aktif untuk pengentasan kemiskinan sebagai penentu keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan. Dimana lembaga BKM “Margo Rukun Sejahtera” dapat membantu masyarakat kelurahan Mergosono dan menjadi tolak ukur keberhasilan program PNPM Mandiri Perkotaan.

d. Upaya Sarana dan Prasarana Kelembagaan

Sarana dan prasarana merupakan hal sangat penting juga dalam lembaga untuk peningkatan kapasitas lembaga tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Edarlin (1997:148) mengenai penyediaan modal (dimensi fisik) menyangkut sarana material, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan termasuk gedung, dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang ada pada suatu organisasi. Sarana dan prasarana yang dimiliki suatu lembaga menentukan pula keberdayaan dari lembaga tersebut karena jika sarana dan prasarana yang ada dalam lembaga tersebut baik dan lengkap maka kinerja dari sumber daya yang ada didalamnya akan menjadi baik karena didukung dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap, sehingga tugas-tugas yang dibebani kepada tiap-tiap pengurus akan cepat terselesaikan. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi dalam suatu lembaga, akan menghambat terhambatnya kinerja dari sumber daya manusia yang ada didalamnya karena tidak dapat bekerja dengan cepat dan baik.

Sarana dan prasarana yang ada di BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono merupakan sarana yang sangat mendukung dalam proses pembuatan laporan-laporan kegiatan pelaksanaan dan untuk memudahkan pengerjaan tugas-tugas yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada di BKM. Sarana dan prasarana yang ada merupakan hasil dana yang didapat dari hasil keuntungan dana yang digulirkan oleh pemerintah dan keuntungan bunga peminjaman dana bergulir ke masyarakat. Dikarenakan sangat penting sekali bagi setiap organisasi atau lembaga mempunyai inventaris yang berguna untuk mendukung pengerjaan tugas-tugas yang

ada. Inventaris yang dimiliki BKM untuk saat ini dapat dikatakan kurang berdaya. Dilihat pada data yang ada banyak yang sudah kurang layak, dikarenakan sudah lama digunakan. Oleh sebab itu, terkadang anggota BKM merasa kesulitan dengan adanya inventaris yang kurang berdaya. Seperti halnya dengan banyaknya pengurus yang ada BKM “Margo Rukun Sejahtera” mempunyai 1 komputer saja dan printer pun juga masih belum diperbaiki. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana dalam suatu lembaga maupun organisasi sangat penting demi kelancaran proses pelaksanaannya contohnya saja, sebaiknya difasilitasi internet maupun laptop.

e. Upaya Penanganan Kemiskinan

Pemerintah menyerahkan upaya penanganan kemiskinan kepada BKM “Margo Rukun Sejahtera”, karena BKM tersebut merupakan lembaga lokal yang berada di tengah-tengah masyarakat agar dapat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan agar dapat meningkatkan kondisi sosial-ekonomi secara mandiri dan tentunya untuk mengurangi kemiskinan yang ada di wilayah masing-masing. Dalam penanganannya BKM “Margo Rukun Sejahtera” melakukan upaya pemberdayaan BKM kepada masyarakat yang melalui tiga aspek pemberdayaan (TRIDAYA). Aspek tridaya yang dimaksud adalah :

1. Pemberdayaan Lingkungan yang meliputi peningkatan terhadap berbagai sarana dan prasarana lingkungan.
2. Pemberdayaan sosial meliputi kegiatan yang bersifat kegiatan sosial.

3. Pemberdayaan ekonomi meliputi pemberian modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam. .

Kemudian dalam kegiatan TRIDAYA yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan mempunyai rencana kerja yang dilihat dari banyaknya persoalan kemiskinan di Kelurahan Mergosono dengan program-program penanggulangannya. Dengan membentuk KSM dengan tiga golongan yakni sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kendala dilapangan yang dapat dilihat dari KSM sosial dan lingkungan kurang kepedulian dari masyarakat yang termasuk menjadi relawan, sementara kalau dilihat dari ekonomi adanya dana bergulir yang macet. Adapun melihat persoalan kemiskinan di kelurahan Mergosono dengan program-program penanggulangan, tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang bersamaan atau singkat karena keterbatasan waktu dan dana.

Kemudian saat ini, hasil dilapangan menunjukkan bahwa sebagian warga masyarakat kelurahan Mergosono sudah menikmati hasil manfaat dan program PNPM Mandiri Perkotaan, karena selain adanya perbaikan sarana dan prasarana di wilayah kelurahan Mergosono, ada juga masyarakat yang menikmati dana BLM yang diberikan kepada masyarakat untuk penambahan modal usaha mereka sehingga dengan adanya dana tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Namun untuk saat ini, suatu program, yakni PNPM Mandiri Perkotaan belum dapat menghapus kemiskinan yang ada di kelurahan Mergosono, masih adanya warga yang mempunyai ciri-ciri kemiskinan seperti yang dapat dilihat pada tabel 5 bahwa di

Kelurahan Mergosono banyak yang tamatan SD, masih ada yang buta huruf dan tidak sekolah.

Hasan yang dikutip oleh Sumodiningrat (1997:15) menyebutkan bahwa kelompok penduduk miskin mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

“Pertama, sebagian besar penduduk miskin tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Kedua, pada umumnya penduduk miskin tidak bekerja secara penuh (*full timer*). Ketiga, mereka kebanyakan tidak mempunyai peralatan produksi, peralatan kerja yang memadai. Keempat, sebagian besar penduduk miskin berpendidikan rendah.

Pada kelurahan Mergosono juga terdapat ciri-ciri dari apa yang dikemukakan oleh Hasan, bahwa penduduk miskin di kelurahan Mergosono banyak yang masih berpenghasilan rendah, tidak mempunyai peralatan produksi yang memadai dikarenakan tidak mempunyai modal yang cukup untuk berproduksi, hal ini disebabkan penduduk miskin tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Hasan yang dikutip oleh Sumodiningrat (1997:15) menyebutkan bahwa kelompok penduduk miskin mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sebagian besar penduduk miskin tidak mempunyai penghasilan yang tetap.
2. Pada umumnya penduduk miskin tidak bekerja secara penuh (*full timer*).

3. Mereka kebanyakan tidak mempunyai peralatan produksi, peralatan kerja yang memadai.
4. Sebagian besar penduduk miskin berpendidikan rendah.

Ciri-ciri kemiskinan yang ada di kelurahan Mergosono, dapat dilihat yakni ketidakmampuan mempunyai penghasilan tetap yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan konsumsi dasar, kemudian banyaknya pengangguran karena akibat dari dampaknya kepadatan penduduk di perkotaan, banyaknya warga yang terpaksa tinggal di hantaran sungai dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimaksud bahwa masih ada yang tidak tamak SD, tidak sekolah maupun buta huruf yang merupakan akibat dari tidak adanya jaminan masa depan seperti investasi pendidikan. Manfaat PNPM Mandiri Perkotaan adalah menangani permasalahan kemiskinan untuk mencapai kata tuntas. Di Kelurahan Mergosono membantu dengan cara pemberian bantuan modal dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan maupun sosial, dimaksudkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan meskipun belum sepenuhnya dapat mengatasi pengangguran yang ada. Penghasilan yang dialami masyarakat miskin masih tergolong cukup rendah untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar. Upaya yang dilakukan BKM masih dalam tahap usaha secara berkelanjutan dan terus-menerus oleh pihak pemerintah maupun lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tentunya. Upaya penanganan kemiskinan memerlukan bantuan dari internal kelurahan maupun masyarakat. Namun, dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk kemakmuran masyarakat miskin dirasa belum

sepenuhnya dapat berhasil yang diakibatkan oleh penghasilan rendah. BKM belum berhasil tuntas dalam pergerakan ke dalam kemakmuran ekonomi rakyat miskin dan hanya memberantas secara mendasar.

Pengentasan kemiskinan dari tahun ke tahun menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan yang belum berhasil tuntas diberantas. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan perlu adanya skala prioritas, arah dan strategi yang handal sehingga persoalan kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat teratasi. Upaya penanganan kemiskinan tersebut, BKM “Margo Rukun Sejahtera” kelurahan Mergosono telah melakukan perencanaan pelaksanaan sebagai prioritas pembangunan yang tertulis dalam PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan), baik menyangkut masalah kesehatan, pendidikan. Ekonomi dan lingkungan. Hal tersebut masih terus diupayakan oleh BKM demi terwujudnya percepatan penanggulangan kemiskinan.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat

a. Faktor pendukung

Dalam peningkatan kapasitas kelembagaan untuk keberhasilan program, terutama kelembagaan yang berasal dari masyarakat untuk masyarakat miskin dimana dalam penelitian saya kepada Badan Keswadayaan Masyarakat yang telah diciptakan sebagai lembaga penanganan kemiskinan dengan misi sosialnya, diperlukan suatu faktor-faktor pendukung demi kelancaran perjalanan lembaga tersebut. Begitu juga

pada BKM "Margo Rukun Sejahtera" yang mempunyai faktor-faktor pendukung, antara lain :

1. Dana yang berasal dari bantuan langsung masyarakat, dengan adanya dana rencana program yang dilaksanakan dapat berjalan. Baik menyangkut sumber daya manusia maupun pelaksanaan program. Memang pada dasarnya anggota BKM bekerja dengan rasa sosial, namun di sisi lain anggota BKM ini dibayar agar senantiasa dapat giat bekerja dengan tugas yang ada.
2. BKM sudah didukung oleh lembaga-lembaga internal kelurahan, tanpa lembaga-lembaga seperti RT, RW, PKK, LPMK, dll. BKM tidak dapat menjalankan peran dan pelaksanaan program dengan baik, oleh sebab itu dukungan terhadap lembaga maupun masyarakat kelurahan sangat penting demi keberhasilan pelaksanaan program.

b.Faktor penghambat

Dalam peningkatan kapasitas suatu kelembagaan, dalam hal ini penelitian saya pada lembaga lokal yakni BKM yang merupakan lembaga dari rakyat untuk rakyat, mempunyai faktor penghambat pula yang telah menjadi kendala dalam keberhasilan penanganan kemiskinan sebagai upaya dari pemberdayaan lembaganya. Kemudian, menurut Yuwono (2003:9) hambatan-hambatan yang dialami dalam peningkatan kapasitas (*Capacity Building*) suatu kelembagaan adalah

1) Resistensi legal-prosedur

Resistensi legal-prosedur biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang kurang atau tidak mendukung program pembangunan kapasitas ini dengan berbagai alasan.

2) Resistensi dari pimpinan

Mendasarkan diri pada argumen bahwa dengan pembangunan kapasitas, maka mau tidak mau kemampuan staff akan meningkat dan bisa saja mengancam kedudukan mereka.

3) Resistensi dari staff

Resistensi dari staff bervariasi bisa kecil ataupun besar tergantung budaya dan suasana yang ada dalam lingkungan organisasi tertentu. Hambatan yang paling utama adalah bahwa pembangunan kapasitas merupakan sebuah bentuk inovasi atau perubahan sehingga mereka mesti melakukan perubahan atau usaha-usaha inovatif lainnya.

4) Resistensi konseptual

Resistensi konseptual terhadap konsep pembangunan kapasitas muncul karena program pembangunan kapasitas menimbulkan pekerjaan dan beban yang harus ditanggung oleh semua elemen dalam organisasi tertentu.

5) Mispersepsi

Mispersepsi dalam capacity building akan menimbulkan self-capacity building. Artinya kemampuan individu menjadi diabaikan tanpa melihat aspek-aspek lainnya.

Banyak faktor yang dapat menghambat dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, hal ini yakni di BKM "Margo Rukun Sejahtera" yang pertama yakni resistensi dari staff, seperti halnya pada pelatihan khusus KSM, dari 50 undangan yang telah disebarakan yang hadir hanya 22 orang, hal tersebut yang membawa dampak pada peningkatan kapasitas kelembagaan. Kemudian dalam penelitian saya, yang menyebutkan bahwa kurang aktifnya anggota PK BKM dalam mengikuti rapat maupun urusan sosial kemasyarakatan membuat BKM ini kurang berjalan dengan lancar dan baik sebagaimana mestinya karena dirasa sangat sulit untuk menemukan kepedulian sosial dalam jiwa anggota, dimaksud bahwa BKM ini merupakan lembaga sosial masyarakat yang tidak dibayar.

Kemudian resistensi konseptual, dapat dikatakan bahwa dalam program pembangunan kapasitas menimbulkan pekerjaan yang ditanggung oleh organisasi tertentu. Dikatakan di BKM "Margo Rukun Sejahtera" yang pada saat ini tidak mempunyai sekretaris, sehingga beban tugas yang ada pada sekretaris tersebut membebani Unit Pengelola Keuangan (UPK) sehingga UPK mengerjakan tugas yang begitu banyaknya.

Faktor penghambat yang berasal dari internal BKM sangat mempengaruhi pemberdayaan anggota BKM. Upaya yang dilakukan belum dapat mengatasi persoalan yang ada, faktor utama hambatan adalah dari anggotanya sendiri seperti diundang rapat tidak pernah hadir, namun jika kebijakan yang sudah ditentukan saat rapat tidak disetujui maupun tidak ketahui oleh anggota BKM lain, hal tersebut

menjadi kurangnya koordinasi antara anggota dalam PK BKM. Dimaksudkan bahwa perlu adanya pemberdayaan dari lembaga itu sendiri dengan baik dan benar sebelum memberdayakan masyarakat secara menyeluruh seperti adanya penguatan lembaga dalam peningkatan kapasitasnya. Penguatan tersebut seperti dalam hal pelatihan maupun kegiatan yang membuat harmonis dalam kelembagaan BKM tersebut.

